

Studi Deskriptif *Collaborative Governance* di Wakatobi: Implikasi untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Erfan Saputra ^{1*}; Saidin ²; Faturachman Alputra Sudirman ³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ; erfansaputra@gmail.com

* Correspondence : erfansaputra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobi. penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan informan Kepala bidang pendapatan I (BAPENDA) Kabupaten Wakatobi dan Dua (2) mitra yang melakukan kerja sama yaitu, Wakatobi Dive Resort, Patuno Resot tersebut secara *purposive sampling* kemudian di dukung dengan Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Wakatobi(studi pada badan pendapatan daerah kabupaten Wakatobi dilihat dari 3 aspek yaitu *Principled Engagement* (keterlibatan berprinsip), *Shared Motivation* (motivasi bersama), dan *Capacity for Joint Action* (kapasitas untuk tindakan bersama). Dari aspek keterlibatan berprinsip peneliti menyimpulkan bawah keterlibatan berprinsip belum terlaksana dengan maksimal yang dimana masih kurangnya kepercayaan antara pihak BAPENDA dengan sebagian mitra kerjasama dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya Pada aspek motivasi bersama peneliti menyimpulkan bawah motivasi bersama sudah terlaksana dengan baik dikarenakan pada semua aspek mulai dari rasa saling percaya, pengertian, legitimasi internal, serta komitmen sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Kata kunci : *Collaborative, Governance, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

This study aims to know the government collaboration to increase the real regency revenue (PAD) at Wakatobi regency. This study used qualitative research with descriptive qualitative analysis, the data was collected from an interview with the first head of the management office of regional revenue (BAPENDA) of Wakatobi Regency and two partners who collaborated which consists of Wakatobi dive resort and patunk resort chosen trough purposive sampling and supported by the observation and documentation. The results of this study show that the government collaboration on improving regency real revenue of Wakatobi regency (study on the management office of regional revenue at Wakatobi regency can be seen from 3 aspects which consist of principle engagement, shared motivation, and capacity for joint action).From the principle engagement, researchers conclude that the principle involvement has not been maximal yet and there are still unbelievably of both parties, BAPENDA and several cooperation partners to improve Wakatobi regency's real revenue. Netherlands on motivation aspect, the researcher concludes that motivation aspect has been done perfectly because on every aspect starting from the feeling of trust, understanding, internal legitimating, and also the commitment has been running along with the regulation.

Keywords : *Collaborative, Governance, Improving Regency Real Revenue*

Pendahuluan

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan bisa mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, termasuk dalam biaya pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan atau manajemen keuangan daerah yang melibatkan semua sumber daya, merupakan salah satu elemen yang sangat vital dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merancang sistem keuangan daerah agar dapat berjalan dengan efektif, sehingga mampu memberikan dukungan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional (Tomy, 2015).

Dalam mencapai hal tersebut, diperlukan pengaruh pengetahuan yang dapat memberikan kemudahan dan kekuatan yang kuat. Salah satu bidang pengetahuan yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi saat ini adalah *Collaborative Governance*. Paradigma *Collaborative Governance* mewakili atau mencerminkan bentuk kerjasama di mana berbagai pihak, mulai dari individu, kelompok, hingga organisasi, bekerja bersama dalam berbagai kapasitas (Sudirman et al., 2022). Kerjasama ini dijalankan oleh setiap pihak dengan tujuan mencapai titik kesepakatan yang telah disetujui secara bersama-sama (Frame et al., 2015). *Collaborative Governance* menjadi sebuah proses yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai lapisan masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, serta pihak lain yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintahan secara independen untuk menetapkan tujuan bersama dalam menangani masalah atau potensi yang ada dalam suatu wilayah (McGuire, 2016). Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) menekankan dinamika kolaborasi terdiri dari *Principled Engagement* (keterlibatan berprinsip), *Shared Motivation* (motivasi bersama), *Capacity for Joint Action* (kapasitas untuk tindakan bersama).

Adanya kewenangan dalam rangka otonomi daerah tersebut menuntut kesiapan Pemerintah Daerah sendiri dalam pelaksanaannya karena semakin bertambah pula urusan yang ditanganinya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditinjau dari tugas dan fungsi Pemerintah Daerah memiliki arti yang strategis, karena disamping merupakan salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya, akan berkaitan pula dengan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi sumber-sumber dana daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan ditandai dengan meningkatnya daya beli dan kemampuan membayar pajak dan retribusi daerah. Setiap Pemerintah Daerah berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan lokal yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan Pemerintah daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah, semakin rendah tingkat ketergantungan Pemerintah daerah pada Pemerintah pusat. Sebaliknya, jika penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, maka tingkat ketergantungan Pemerintah daerah pada Pemerintah pusat akan lebih tinggi (Erawati dan Rahmawati, 2016).

Berdasarkan jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wakatobi dari tahun 2019-2021 mengalami tren penurunan, hanya saja pada 2021 mengalami kenaikan namun tidak signifikan dari 847.589.634,- menjadi 939.987.656,-. Dengan melihat tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akhir-akhir ini tentu harus menjadi *warning* bagi pemerintah untuk lebih mampu mengembangkan dan mengoptimalkan kekuatan semua potensi yang ada di Kabupaten Wakatobi. Dengan potensi sektor pajak yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Wakatobi harus dijadikan sebagai potensi besar untuk dikembangkan secara menyeluruh dan bernilai ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wakatobi ke depannya.

Di samping pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada perlu ditingkatkan dan daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD sehingga dengan semakin banyak sumber-sumber PAD yang dimiliki, daerah akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya. Salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan hubungan kerja sama dengan seluruh *stakeholder* untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Wakatobi

Tata kelola kolaboratif telah muncul sebagai kerangka kerja yang penting untuk meningkatkan generasi pendapatan lokal, terutama dalam konteks pengembangan regional. Tinjauan literatur ini mensintesis berbagai studi yang menyoroti mekanisme, manfaat, dan tantangan yang terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam meningkatkan hasil ekonomi lokal. Salah satu keuntungan utama dari tata kelola kolaboratif adalah kemampuannya untuk mendorong partisipasi inklusif di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah lokal, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Misalnya, Kurube menekankan peran pemerintah lokal dalam melibatkan berbagai aktor untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui inisiatif pengembangan berkelanjutan, menggambarkan bagaimana tata kelola kolaboratif dapat menciptakan ruang untuk partisipasi dan ko-produksi layanan publik (Kurube, 2023). Demikian pula, Zhou dan Dai membahas bagaimana intervensi hierarkis dapat memfasilitasi upaya kolaboratif dengan mengelola konflik dan mengoordinasikan keterlibatan pemangku kepentingan, yang penting untuk menjaga integritas proses kolaboratif (Zhou & Dai, 2021). Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi terstruktur dalam mencapai hasil tata kelola yang efektif.

Selain itu, literatur menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan pengembangan ekonomi lokal secara signifikan dengan memanfaatkan modal sosial dan keterlibatan komunitas. Campbell et al. berpendapat bahwa pemerintah kabupaten yang bekerja sama secara aktif dengan masyarakat sipil dapat lebih baik merespons kebutuhan warga, sehingga mendorong pengembangan ekonomi (Campbell et al., 2017). Hal ini juga didukung oleh Tuurnas et al., yang menyoroti bahwa budaya sipil yang kuat dan organisasi komunitas adalah penting bagi pemerintah lokal untuk berinovasi dan menerapkan strategi ekonomi yang efektif (Tuurnas et al., 2019). Interaksi antara keterlibatan komunitas dan tata kelola lokal sangat kritis, karena menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara pemangku kepentingan, yang dapat mengarah pada hasil ekonomi yang lebih baik.

Namun, implementasi tata kelola kolaboratif tidak tanpa tantangan. Nwogwugwu dan Iyanda menunjukkan bahwa meskipun ada manfaat potensial, pemerintah lokal sering menghadapi kesulitan dalam menetapkan kerangka kerja kolaboratif yang efektif karena

kurangnya kejelasan dalam peran dan tanggung jawab di antara pemangku kepentingan (Nwogwugwu & Iyanda, 2015). Sentimen ini dipertegas oleh Yusliani et al., yang mencatat bahwa ketiadaan perjanjian formal, seperti memorandum of understanding (MoU), dapat menghambat upaya kolaboratif yang bertujuan meningkatkan investasi asing dan daya saing regional (Yusliani et al., 2022). Tantangan ini menyoroti kebutuhan akan desain institusi yang jelas dan kepemimpinan untuk memfasilitasi kolaborasi yang efektif. Selain itu, dinamika kompetisi di antara pemerintah lokal dapat mempersulit upaya kolaboratif. Lee dan Lee membahas bagaimana pemerintah lokal sering terlibat dalam perilaku kompetitif yang dapat merusak inisiatif kolaboratif, terutama di daerah yang secara ekonomi terfragmentasi (Lee & Lee, 2020). Lanskap kompetitif ini memerlukan pendekatan strategis terhadap kolaborasi, di mana pemerintah lokal harus menyeimbangkan insting kompetitif mereka dengan kebutuhan akan pengaturan kerjasama untuk mengatasi tantangan bersama secara efektif (Rubado, 2022).

Dari peninjauan literatur yang ada, terdapat beberapa gap yang jelas dan yang terlihat mengarah pada kebaruan dalam penelitian ini. Banyak literatur menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam mengelola sumber daya dan layanan, namun sedikit yang fokus pada pengaruhnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di konteks daerah tertentu seperti Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mempelajari bagaimana *collaborative governance* dapat diterapkan untuk meningkatkan PAD, khususnya melalui penerapan tiga dimensi yang kritis: *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for Joint Action*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan dampak dari *collaborative governance* terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Wakatobi. Dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang dinamika proses yang terjadi, penelitian ini berharap dapat menawarkan perspektif baru dalam literatur tata kelola kolaboratif, terutama dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi literatur yang ada dengan memberikan bukti empiris tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. Hal ini memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam *governance*, serta untuk pemerintah daerah lainnya yang ingin meningkatkan kemandirian fiskal mereka.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis *collaborative governance* dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana kebijakan dan praktik kolaboratif dapat mempengaruhi pendapatan daerah, dengan fokus pada interaksi dan proses yang terlibat. Informan penelitian melibatkan pihak-pihak kunci dari pemerintah dan mitra kerja, termasuk Kepala Bidang Pendapatan I (BAPENDA) Kabupaten Wakatobi dan dua mitra dari *Wakatobi Dive Resort* dan *Patuno Resort*. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan informasi mendalam mengenai proses *collaborative governance* yang terlibat dalam peningkatan PAD.

Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, berfokus pada narasi dan pengalaman subjektif para informan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara tak berstruktur,

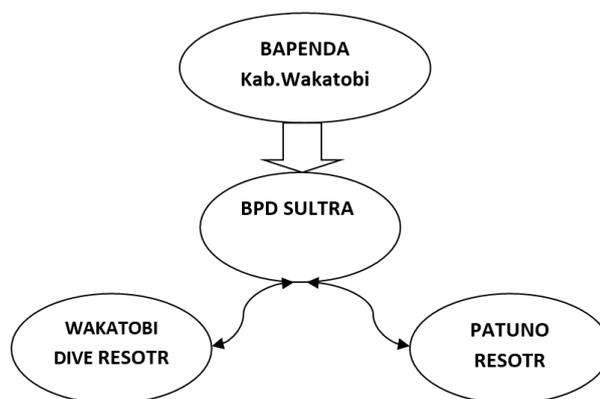
observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi, yang melibatkan pencatatan sistematis fenomena yang terjadi. Wawancara dilakukan dengan pedoman yang telah disiapkan untuk menjawab pertanyaan spesifik tentang *collaborative governance*, sedangkan observasi membantu mengidentifikasi fenomena relevan yang terjadi selama penelitian. Analisis data mengadopsi metode analisis interaktif dari Miles & Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini memungkinkan pengolahan data yang mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika *collaborative governance* dan dampaknya terhadap PAD di Kabupaten Wakatobi.

Hasil dan Pembahasan

Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wakatobi.

Collaborative governance merupakan *governance* yang mendorong supaya bersama dari pemangku kepentingan dan *non-state* untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah-masalah kompleks secara pengambilan keputusan kolektif. Implikasi yang ditimbulkan dari adanya kolaborasi itu adalah munculnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan, berbagai risiko, pemenuhan kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab dan balas jasa yang diharapkan oleh masing-masing anggota kelompok. Betapa kebersamaan tersebut dapat menimbulkan kesan atau identitas adanya kerja sama dan kebersamaan antar pihak yang berkolaborasi. Dengan demikian, konsep kolaborasi itu juga berimplikasi terhadap terciptanya sikap saling percaya satu sama lain dalam segala situasi, waktu, kesempatan, serta upaya dan dedikasinya.

Gambar 1. Hubungan Kolaborasi Mitra Kerjasama



Sumber : Olahan penulis (2024)

Gambar 1 di atas sejalan dengan teori *collaborative governance* yang di paparkan dalam buku Retno dan Hardi (2020) yang mengatakan bahwa aktor-aktor lain dari masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah semuanya berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Masyarakat, sektor swasta, dan aktor-aktor lainnya dalam melakukan kolaborasi. Selain itu, gambar di atas menjelaskan terkait hubungan kerjasama antara BAPENDA dengan mitra kerjasama yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BAPENDA merupakan

pengambil inisiatif dalam melakukan kerjasama dengan berbagai sektor dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu juga Bapenda melakukan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bendahara umum daerah kabupaten Wakatobi. Selanjutnya setiap mitra yang melakukan kerjasama dengan Kabupaten Wakatobi dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi secara online melalui aplikasi *prodinda waopa waore* yang akan di rancang sebagai pembayaran pajak dan retribusi digital, hal ini dalam rangka mengimplementasikan amanah peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, Tentang tim percepatan digitalisasi Pemda dan Peraturan Bupati Kabupaten Wakatobi.

Dampak pada *Collaborative Governance* terkait dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor, sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi. Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik atau feedback, yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi.

1. *Principled Engagement*

Pelibatan prinsip terjadi seiring berjalannya waktu melalui pengulangan empat elemen proses dasar: penemuan, definisi, pertimbangan, dan tekad. Hal ini dibangun berdasarkan fase pembelajaran kolaboratif oleh Daniels dan Walker (2001) dan dapat dianggap sebagai elemen proses pembelajaran sosial yang dinamis (misalnya, Bandura 1977). Melalui proses berulang ini, mitra kolaborasi mengembangkan tujuan bersama dan teori tindakan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Teori tindakan bersama ini mencakup pemahaman mengenai besarnya masalah atau tantangan yang ditangani, serta ruang lingkup dan skala kegiatan atau intervensi yang dipilih kelompok (Koontz et al 2004; Leach dan Pelkey 2001).

Merujuk pada keterlibatan atau partisipasi seseorang atau kelompok dengan memegang teguh prinsip-prinsip, nilai-nilai, atau standar etika tertentu dalam interaksi atau kerjasama. Dalam konteks ini, pihak yang terlibat berkomitmen untuk menjalankan tindakan dan keputusan mereka sesuai dengan suatu set prinsip yang diakui bersama. *Principled engagement* mendorong interaksi yang didasarkan pada nilai-nilai moral atau etika yang dianggap penting oleh para pihak yang terlibat, menciptakan dasar kepercayaan dan keterlibatan yang saling menghormati.

Berdasarkan fase pembelajaran kolaboratif oleh Daniels dan Walker (2001) terdapat empat elemen proses dasar: penemuan, definisi, pertimbangan, dan tekad. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis terkait prinsip-prinsip dasar keterlibatan dalam kolaborasi oleh Tomy Tomson yang merupakan salah satu mitra kerja sama karyawan bidang humas Wakatobi Dive Resort yang mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah kami selalu berkomitmen dalam menjalankan kegiatan sesuai prinsip-prinsip dalam regulasi yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (hasil wawancara 7 Maret 2024)”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kolaborasi pemerintah perlu menjaga kepercayaan dengan para pihak yang terlibat untuk terus berkomitmen dalam melakukan kerjasama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Wakatobi. Selain itu juga, ia menjelaskan terkait masalah atau tantangan bahwa:

“Dalam melakukan kerjasama pemerintah harus memahami masalah yang dihadapi misalnya mengembangkan kepercayaan antar anggota tim terkait peningkatan pendapatan asli daerah sehingga membantu memastikan bahwa kolaborasi difokuskan pada prinsip-prinsip dalam melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk tujuan bersama dan harus selaras dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. (hasil wawancara 7 Maret 2024)”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kerjasama pemerintah harus memberikan pemahaman tentang keterlibatan berprinsip penting dalam melakukan kerjasama sehingga mempermudah untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, untuk mengetahui terkait *Principled Engagement* (keterlibatan berprinsip) terkait prinsip-prinsip dasar keterlibatan dalam kolaborasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Gani Nggatu, S.E selaku kepala bidang I pendapatan (BAPENDA) Kabupaten Wakatobi, yaitu :

“Dalam melakukan kerjasama, kami menggunakan prinsip komunikasi yang baik dengan mitra dalam kerjasama, selain itu dapat membangun kepercayaan antar mitra dengan adanya perjanjian atau kesepakatan kerja sesuai dengan regulasi. Disamping itu juga, kami melakukan kerja sama dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah, dimana PT. Bank Pembangunan Daerah dipercayakan sebagai bendahara umum daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 februari 2024 lalu melalui surat perjanjian kerjasama. (hasil wawancara 7 maret 2024).”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *Principled Engagement* (keterlibatan berprinsip) dalam melakukan kerja sama antara mitra kerja dengan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan proses penemuan kebutuhan dalam kesepakatan kerja sama. selain itu, Gani Nggatu, S.E juga mengungkapkan terkait prinsip-prinsip dasar keterlibatan dalam kolaborasi bahwa :

“Kami selaku pemerintah perlu menjaga kolaborasi seperti melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, transparansi, dan keadilan dalam setiap bentuk kerjasama yang dilakukan. Dimana transparansi yang dimaksud yaitu dengan penerapan keterbukaan semua informasi terkait penggunaan dana kepada seluruh anggota dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi/kerjasama. (hasil wawancara 6 Maret 2024).”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *principle Engagement* (keterlibatan berprinsip) dalam kolaborasi BAPENDA melakukan penemuan potensi peningkatan PAD dengan melibatkan seluruh pihak. Adapun pemaparan dari Daviyana salah satu mitra kerjasama asisten menejer Patuno Resot terkait standar etika dalam interaksi dalam kerjasama, yaitu :

“Kami memang melakukan kerjasama antara instansi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wakatobi. Dalam melakukan kerja sama, kami selalu menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah terkait kegiatan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wakatobi”. (hasil wawancara 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar instansi pemerintah di Kabupaten Wakatobi dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya melalui sektor pariwisata, dengan menjaga komunikasi yang baik antar pihak terkait. Selain itu, Daviyana juga mengaitkan terkait standar etika :

“Dalam melakukan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan pemerintah harus memberikan pemahaman dan menghargai berbagai pandangan para aktor yang ingin melakukan kerjasama, seperti bagaimana keputusan akan dibuat dan bagaimana masalah akan diselesaikan, aturan dasar ini harus disetujui oleh semua pemangku kepentingan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Wakatobi”. (hasil wawancara 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kerjasama, pemerintah harus memberikan pemahaman dan saling menghargai agar pengambilan keputusan berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga masalah dapat diselesaikan dengan mudah.

2. *Shared Motivation*

Motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen: rasa saling percaya, pengertian, legitimasi internal, dan komitmen. Semua kecuali legitimasi termasuk dalam konfigurasi proses kolaboratif Ansell dan Gash (2008). Motivasi bersama menyoroti elemen interpersonal dan relasional dari dinamika kolaboratif dan kadang-kadang disebut sebagai modal sosial (Colman 1988; Putnam 2000; Putnam, Leonardi, dan Nanetti 1993). Motivasi bersama sebagian diawali oleh keterlibatan yang berprinsip dan dalam hal ini, ini merupakan hasil antara; namun, begitu dimulai, motivasi bersama juga memperkuat atau mempercepat proses keterlibatan yang berprinsip (Huxham dan Vangen 2005).

Merujuk pada motivasi atau dorongan bersama yang dimiliki oleh dua atau lebih individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama atau memiliki kepentingan yang serupa. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terlibat memiliki dorongan atau tujuan yang saling terkait dan saling mendukung, menciptakan landasan yang kuat untuk kerjasama dan kolaborasi.

Motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen: rasa saling percaya, pengertian, legitimasi internal, dan komitmen. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara diungkapkan oleh Gani Nggatu selaku kepala bidang I (BAPENDA) Kabupaten Wakatobi terkait legitimasi internal, yaitu :

"kami (BAPENDA) dalam melakukan penemuan potensi peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan musyawarah dan pertimbangan. Pada penemuan terdapat pengungkapan kepentingan bersama dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kami (BAPENDA) dengan mitra mempertimbangkan kerja sama dengan cara melakukan musyawarah yang dilakukan di kantor Bapenda pada tanggal 26 februari 2024. (hasil wawancara 6 Maret 2024)."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bawah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Wakatobi tanpa disadari, sebenarnya telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, tetapi sebagian besar kerjasama yang dibangun masih bersifat jangka pendek dengan intensitas hubungan yang terbatas. Kerjasama yang dibangun tidak melibatkan sumber daya, tidak ada penggabungan sumberdaya. Pemerintah seharusnya lebih memahami kerjasama sebagai kemitraan antara pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wakatobi.

Selain itu, Gani Nggatu, S.E mengatakan bahwa :

"Sebelum melakukan kerjasama kami selalu memberikan penjelasan tentang tujuan dalam melakukan kerjasama sesuai dengan UU NO.1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada semua yang ingin berkomitmen dalam melakukan kerjasama dan melibatkan semua pihak untuk proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kerjasama. (hasil wawancara 6 maret 2024)."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kerjasama pemerintah harus memberikan pemahaman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku terkait motivasi bersama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wakatobi Adapun pemaparan dari Tomy Tomson selaku karyawan mitra kerja sama bagian humas Wakatobi dive resort terkait rasa saling percaya, yaitu :

“Pada saat melakukan komitmen kerjasama dengan pemerintah daerah, kami saling memberikan pemahaman atau masukan sebagai bentuk mempertahankan kepercayaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Wakatobi. (hasil wawancara 7 maret 2024)”

Gambar 2. Musyawarah Bapenda dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah



Sumber : Kantor Bapenda Kabupaten Wakatobi

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kerjasama hal yang terpenting adalah saling memberikan pemahaman satu sama lain agar dapat dengan mudah mencapai tujuan bersama yakni meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wakatobi. Adapun pemaparan dari Daviyana salah satu mitra kerjasama asisten manajer Patuno Resot terkait rasa saling percaya, yaitu :

“Pada saat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kami selalu mempertahankan kepercayaan kerja sama dengan melakukan komunikasi yang baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wakatobi. (hasil wawancara 7 maret 2024)”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pihak lain dengan landasan pemahaman, kepercayaan, dan komunikasi yang baik, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan merupakan kunci untuk meningkatkan PAD Kabupaten Wakatobi.

3. Capacity for Joint Action (kapasitas untuk tindakan bersama)

Tujuan dari kolaborasi adalah untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara bersama-sama yang tidak dapat dicapai secara terpisah. Seperti yang dijelaskan oleh Himmelman (1994), kolaborasi adalah terlibat dalam aktivitas kerjasama untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, aktor-aktor harus menghasilkan kapasitas baru untuk melakukan aksi bersama yang belum pernah ada sebelumnya dan mempertahankan atau mengembangkan kapasitas tersebut selama tujuan bersama tercapai. Peningkatan kapasitas yang diperlukan ditentukan selama keterlibatan berprinsip, yang berasal dari teori tindakan yang jelas atau diam-diam dari para peserta yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaboratif mereka, dan kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh ruang lingkup dan skala tujuan dan kegiatan kelompok.

Merujuk pada kemampuan bersama atau kapasitas kolektif dari dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi untuk bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan atau menjalankan suatu tindakan yang melibatkan kerjasama. Dalam konteks ini, kapasitas bersama ini mencakup sumber daya, keterampilan, dan kemampuan untuk berkoordinasi secara efektif, yang diperlukan untuk mendukung aksi bersama. Pada kapasitas untuk tindakan bersama mencakup beberapa indikator misalnya prosedural dan kelembagaan,

kepemimpinan, kapasitas tindakan bersama, dan sumber daya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terkait sumberdaya oleh Tomy Tomson selaku karyawan mitra kerja sama bagian humas yang mengatakan bahwa :

“Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, kami melakukan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mencapai tujuan dalam menjalankan suatu kerjasama. (hasil wawancara 7 maret 2024)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam melakukan kerjasama peningkatan pendapatan asli daerah pemerintah harus memberikan langkah-langkah dalam menjalankan suatu proses kerjasama serta memberikan dorongan terhadap sumber daya manusia . selain itu juga, Tomy Tomson mengungkapkan terkait prosedural dan kelembagaan, bahwa :

“Pemerintah dalam membangun kerjasama mengacu pada kebijakan atau regulasi yang ada seperti perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan mitra kerjasama sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wakatobi (Hasil wawancara 7 maret 2024)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam melakukan kerjasama mengacu pada regulasi atau kebijakan agar pihak yang terlibat kerjasama mudah memahami maksud dan tujuan dalam proses kerjasama. Adapun pemaparan dari Daviyana salah satu mitra kerjasama asisten manajer Patuno Resot, yaitu :

“Dalam pengambilan keputusan pemerintah membuat kebijakan yang baik sehingga kolaborasi berjalan dengan efektif, dan mencapai tujuan yang diinginkan terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wakatobi. (Hasil wawancara 7 maret 2024)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintah membuat kebijakan yang baik untuk memastikan kolaborasi berjalan efektif, sehingga tujuan bersama terkait PAD di Kabupaten Wakatobi dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara diungkapkan terkait sumberdaya kapasitas tindakan bersama oleh Gani Nggatu selaku kepala bidang pendapatan 1 (BAPENDA) Kabupaten Wakatobi, yaitu:

“Pada saat menjalankan suatu tindakan yang melibatkan kerjasama misalnya seperti menyelesaikan persoalan yang ada contoh kurangnya anggaran dalam melakukan pelatihan terhadap peningkatan sumberdaya, kami melakukan sosialisasi kepada seluruh aktor yang terlibat agar mendapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan sehingga peningkatan pendapatan asli daerah dapat tercapai dengan baik. (hasil wawancara 6 maret 2024).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam menghadapi masalah seperti kurangnya anggaran untuk pelatihan peningkatan sumber daya, semua aktor yang terlibat bekerjasama untuk menemukan solusi yang diharapkan, sehingga tujuan peningkatan pendapatan asli daerah dapat tercapai dengan baik. Selain itu juga, Gani Nggatu mengungkapkan terkait kepemimpinan, bahwa :

“Dalam melakukan kerjasama kepala BAPENDA sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak termasuk pemerintah daerah , sektor swasta, dan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, keputusan yang diambil akan lebih mudah dan mendukung keberlanjutan program peningkatan PAD. (hasil wawancara 6 maret 2024).”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam melakukan kerjasama kepala BAPENDA berperan penting dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi yang melibatkan banyak pihak ini memastikan keputusan ini yang lebih komprehensif (menyeluruh), mendukung implementasi yang lebih efektif, dan meningkatkan keberlanjutan program peningkatan PAD. Selain itu, Gani Nggatu, S.E mengungkapkan bahwa :

“Kepala BAPENDA dan Kepala Daerah sangat mendukung proses kolaborasi sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, penginisiasi pertemuan, fasilitator dan mediator, representasi

dari aktor, kolaborasi secara keseluruhan, pendistributor pengetahuan, serta mendorong penggunaan teknologi kolaborasi peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wakatobi (hasil wawancara 6 maret 2024)."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting selama proses kolaborasi secara keseluruhan, representasi dari aktor, kolaborasi secara keseluruhan, pendistributor pengetahuan, serta mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi. Selain itu, Gani Nggatu, S.E mengungkapkan terkait ruang lingkup kerjasama antara BAPENDA dan BPD bahwa :

"Kami (BAPENDA) bekerjasama dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah untuk mengelola keuangan baik pemasukan dan pengeluaran pendapatan asli daerah di Kabupaten Wakatobi dengan membuka rekening dalam bentuk Rekening Giro pemerintah atau sebagai kas umum . (hasil wawancara 6 maret 2024)."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Wakatobi bekerja sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah untuk mengelola keuangan daerah. Kerjasama ini mencakup pengelolaan pemasukan dan pengeluaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, mereka membuka rekening dalam bentuk Rekening Giro Pemerintah atau sebagai kas umum daerah Kabupaten Wakatobi. Adapun wawancara Daviyana terkait kepemimpinan yaitu :

"Dalam melakukan kerjasama pemimpin kami sangat mendukung kegiatan kolaborasi, misalnya dalam melakukan kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta pengambilan keputusan kerjasama melibatkan semua pihak yang bertujuan untuk membantu pemerintah mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan PAD. (hasil wawancara 6 maret 2024)."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam menjalankan kerjasama, pemimpin sangat mendukung kolaborasi, terutama dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengambilan keputusan dalam kerjasama ini melibatkan semua pihak yang terkait, dengan tujuan untuk membantu pemerintah mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun pemaparan dari Daviyana salah satu mitra kerjasama asisten menejer Patuno Resot terkait sumber daya, yaitu :

"Dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kami berkomitmen dalam pemberdayaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama yakni meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wakatobi (hasil wawancara 7 maret 2024)."

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa mitra kerjasama selalu menjaga kepercayaan melalui komitmen yang dibuat untuk memberdayakan sumber daya yang ada. Selain itu, Daviana juga mengatakan bahwa :

"Dinas Pariwisata menggelar pelatihan kriya batik di Wakatobi yang berlokasi di Patuno Resort pada tanggal 26 oktober 2023 sebagai bentuk pengembangan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat pelaku usaha ekonomi kreatif yang bertujuan untuk menunjang pendapatan masyarakat maupun daerah sesuai PERDA nomor 30 tahun 2019 terkait kerjasama sarana dan prasarana pariwisata barang milik daerah Kabupaten Wakatobi. (hasil wawancara 6 maret 2024)."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam menjalankan kerjasama, pemimpin patuno resort sangat mendukung kolaborasi, terutama dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengambilan keputusan dalam kerjasama ini melibatkan semua pihak yang terkait, dengan tujuan untuk membantu pemerintah mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keterlibatan berprinsip terjadi seiring berjalannya waktu melalui pengulangan empat elemen proses dasar: penemuan, definisi, pertimbangan, dan tekad. Hal ini

dibangun berdasarkan fase pembelajaran kolaboratif oleh Daniels dan Walker (2001) dan dapat dianggap sebagai elemen proses pembelajaran sosial yang dinamis (misalnya, Bandura 1977). Melalui proses berulang ini, mitra kolaborasi mengembangkan tujuan bersama dan teori tindakan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Teori tindakan bersama ini mencakup pemahaman mengenai besarnya masalah atau tantangan yang ditangani, serta ruang lingkup dan skala kegiatan atau intervensi yang dipilih kelompok (Koontz dkk. 2004; Leach dan Pelkey 2001).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* di Kabupaten Wakatobi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks *Principled Engagement*, penelitian ini menemukan bahwa ada peningkatan kepercayaan dan keterlibatan yang lebih inklusif di antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan temuan Kurube (2023) yang menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah lokal yang inklusif untuk mengoptimalkan hasil pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa masih ada kekurangan dalam transparansi dan kejelasan peran di antara pemangku kepentingan, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam pengimplementasian *principled engagement*.

Pada aspek *Shared Motivation*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbentuk di Wakatobi telah berhasil menciptakan motivasi bersama di antara pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan peningkatan PAD. Ini sejalan dengan pendapat Campbell et al. (2017) yang menyatakan bahwa kolaborasi efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan warga, sehingga mendorong pembangunan ekonomi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan visi dan prioritas antara pihak-pihak masih menjadi tantangan, seperti yang diungkapkan oleh Nwogwugwu dan Iyanda (2015), yang menyoroti kesulitan dalam menetapkan kerangka kerja kolaboratif yang efektif.

Kapasitas untuk *Joint Action*, yang merupakan aspek ketiga dari *collaborative governance*, di Kabupaten Wakatobi menunjukkan hasil yang positif dimana telah terjadi peningkatan dalam koordinasi dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Hal ini mencerminkan temuan Tuurnas et al. (2019) yang menekankan pentingnya kapasitas institusi lokal dalam mengimplementasikan strategi ekonomi yang efektif. Namun, seperti yang disoroti oleh Lee dan Lee (2020), dinamika kompetisi antar-pemerintah lokal kadang-kadang dapat menghambat kolaborasi yang efektif, yang juga diidentifikasi sebagai hambatan dalam konteks Wakatobi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *collaborative governance* dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Wakatobi (studi pada badan pendapatan daerah kabupaten Wakatobi) bahwa konsep *collaborative governance* masih ada yang belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertama, Pada aspek keterlibatan berprinsip menurut penulis masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih kurangnya kepercayaan antara pemerintah dalam hal ini BAPENDA dengan mitra kerjasama atau pemangku kepentingan lainnya yang ikut terlibat dalam proses peningkatan pendapatan asli daerah. Kedua, Pada aspek motivasi bersama sudah berjalan dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari semua aspek mulai dari saling percaya, pengertian, legitimasi internal, serta komitmen sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Ketiga, kapasitas tindakan bersama sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek prosedural dan kelembagaan sudah berjalan dengan baik contohnya kerjasama antara pihak pemerintah (BAPENDA dan Kepala Daerah) melakukan kerjasama dengan pihak PT. Bank Pembangunan Daerah SULTRA dimana pihak tersebut ditunjuk sebagai kas umum daerah Kabupaten Wakatobi.

Implikasi dari hasil penelitian ini cukup signifikan untuk praktik tata kelola pemerintahan di daerah lain yang serupa dengan Kabupaten Wakatobi. Pertama, pentingnya mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi semua pemangku kepentingan untuk menghindari konflik dan meningkatkan efisiensi kolaborasi. Kedua, penelitian ini menyarankan pentingnya membangun motivasi bersama yang kuat melalui komunikasi yang efektif dan penciptaan visi yang jelas dan inklusif yang dapat mendukung peningkatan PAD.

Secara lebih luas, temuan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana *collaborative governance* bisa diadaptasi dan ditingkatkan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga mendorong kemandirian ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini juga menegaskan perlunya pendekatan yang lebih dinamis dan adaptif dalam pengelolaan kolaborasi antar sektor, yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan regional dan nasional

Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Campbell, J., Lobao, L., & Betz, M. (2017). Collaborative counties: questioning the role of civil society. *Economic Development Quarterly*, 31(3), 228-243. <https://doi.org/10.1177/0891242417710497>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011) An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 22 (1). 1-29.
- Erawati, T., & Rahmawati, N. (2016). Analisis efektifitas dan efisiensi pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 41-56.
- Huxham, F., Gong, J., Baker, R., Morris, M., & Ianse, R. (2006). Defining spatial parameters for non-linear walking. *Gait & posture*, 23(2), 159-163.
- Kurube, E. (2023). The role of local government in improving the economy and welfare of the wamesa great tribes society in west papua, through a sustainable forest development program: in the perspective of collaborative governance in public service. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(5), 285-298. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i5.2470>
- Lee, Y. and Lee, I. (2020). A longitudinal network analysis of intergovernmental collaboration for local economic development. *Urban Affairs Review*, 58(1), 229-257. <https://doi.org/10.1177/1078087420949936>
- McGuire, S. (2016). World cancer report 2014. Geneva, Switzerland: World Health Organization, international agency for research on cancer, WHO Press, 2015. *Advances in nutrition*, 7(2), 418-419.

- Nwogwugwu, N. and Iyanda, R. (2015). Collaborative governance regime and the responsive governance in ogun state : a study of ogun state council of elders. *Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies*, 3(6), 65-78. <https://doi.org/10.12816/0010961>
- Rubado, M. (2022). Collaborating with the competition? a study of interlocal partnership choices. *Public Administration*, 101(2), 640-654. <https://doi.org/10.1111/padm.12812>
- Sudirman, F. A., Tombora, I. T. A., & La Tarifu. (2022). Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi . *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 114-132. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.335>
- Tuurnas, S., Stenvall, J., Virtanen, P., Pekkola, E., & Kurkela, K. (2019). Towards collaborative development culture in local government organisations. *International Journal of Public Sector Management*, 32(6), 582-599. <https://doi.org/10.1108/ijpsm-05-2018-0119>
- Yusliani, N., Suwaryo, U., Deliarnoor, N., & Kartini, D. (2022). Colaborative governance in increasing foreign investment in dumai city, riau province, indonesia.. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-086-2_124
- Zhou, L. and Dai, Y. (2021). Within the shadow of hierarchy: the role of hierarchical interventions in environmental collaborative governance. *Governance*, 36(1), 187-208. <https://doi.org/10.1111/gove.12664>